

PEMANFAATAN DEvisa PEKERJA MIGRAN INTERNASIONAL DI NUSA TENGGARA BARAT

Lalu Tajuddin¹ dan Tukiran²

Abstract

West Nusa Tenggara is wellknown as the sending place for international migrant workers, especially to Saudi Arabian and Malaysia. The foreign exchanged they produced is big enough, almost Rp1,6 millions per day. Unfortunately, the local government did not receive anything from that amount, except for many complicated problems occurs by the international migrant workers. Many brokers or fund supported agents had benefit from the workers by preparing their administration paper for the departure. These people also put higher interest on the loan made by the workers and they have a lot of money considered that each year the amount of international migrant workers have increased. On the other side, the local government still resistant in showing goodwill to become the fund supported agent which can protect the workers from loan with higher interest.

Keywords: foreign exchanged, international migrant workers.

Pendahuluan

Kesempatan kerja dan upah merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat. Di satu pihak, kesempatan kerja sangat terbatas sehingga banyak dari angkatan kerja yang kemudian menjadi penganggur dalam berbagai bentuk. Namun pada sisi lain, banyak pula lowongan pekerjaan yang tidak terisi karena upah yang rendah dan/atau jenis pekerjaan tersebut tidak memiliki prestise/harga diri bagi pekerja yang melakukannya. Suroto (1993) mengatakan hal yang agak mirip dengan keadaan tersebut. Menurutnya, bekerja tidak hanya berhubungan dengan upah saja, tetapi

status sosial di masyarakat sekitar ikut menentukan. Mereka bersedia bekerja apa saja pada pekerjaan yang paling rendah sekalipun, seperti pekerjaan berbahaya dan kotor, asalkan tidak dikerjakan di sekitar desa tempat tinggalnya.

Menjadi pekerja migran ke negara lain merupakan pilihan utama bagi angkatan kerja dengan latar belakang pendidikan rendah dan miskin keterampilan. Upah yang lebih tinggi daripada yang diterima di daerah asal, pekerjaan tersebut dilakukan di negara lain, dan belunggu imajinasi akan mengalami kisah sukses seperti pekerja migran terdahulu mendorong mereka memutuskan menjadi

¹ Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Program Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Pengajar pada Jurusan Geografi Manusia, Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

pekerja migran internasional. Mereka lebih membayangkan bilamana menjadi sukses bekerja di luar negeri seperti yang dialami sanak keluarga dan teman-teman, tetapi kurang mempertimbangkan apabila gagal. Kegagalan pekerja migran di Arab Saudi, Malaysia, maupun negara lain yang sering terjadi tidak membuat mereka jera. Persoalan ketidakcocokan dengan majikan, upah yang tidak dibayarkan secara penuh, pekerjaan yang sangat berat, dituduh mencuri, dan lain-lain menyebabkan mereka berhenti bekerja dan menjadi pekerja migran ilegal. Akan tetapi, hal-hal seperti ini kurang dipertimbangkan. Bagi mereka yang penting adalah dapat segera berangkat kerja, mendapatkan upah, dan mengirimkannya pada keluarga di daerah asal (Haris dan Andika, 2002).

Perpindahan melampaui batas wilayah politik suatu negara sudah tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Sebagian besar calon pekerja migran internasional tidak mempunyai biaya untuk mengurus persyaratan administrasi hingga keberangkatan. Tidak ada pilihan lain, utamanya bagi yang baru pertama kali berangkat, mereka harus berhubungan dengan penyandang dana/sponsor yang tidak lebih daripada rentenir yang mudah ditemui di daerah mereka (Hugo, 2001). Kinerja sponsor ini sangat profesional, cepat selesai, dan dapat segera berangkat. Calon migran harus mengembalikan semua biaya tersebut setelah sampai di negara tujuan dan bekerja dengan imbalan pinjam satu kembali dua atau tiga tergantung jumlah pinjaman dan lama angsuran.

Penelitian ini menitikberatkan pada kajian tentang devisa yang dihasilkan oleh pekerja migran, utamanya pada pemanfaatan untuk pendidikan dan kesehatan anak serta

pemberdayaan pangan. Di samping itu, ingin juga diketahui siapa saja yang ikut memanfaatkan devisa tersebut selain rumah tangga migran, misalnya pemerintah daerah dan penyandang dana/sponsor. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah betulkah pemerintah daerah tidak mendapatkan apa-apa dari devisa tersebut dan yang paling banyak menikmati justru para penyandang dana/sponsor?

Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, di samping pengumpulan data primer dari informan (keluarga migran dan migran kembali pada saat penelitian), juga dikumpulkan data sekunder dari beberapa instansi, seperti kantor desa, kecamatan, bank, Departemen Tenaga Kerja, BP2TKI, dan beberapa instansi terkait lainnya, sebagai data pendukung. Data primer dikumpulkan dengan cara pengamatan langsung atau observasi lapangan serta wawancara terhadap informan dengan teknik wawancara terstruktur yang telah disiapkan.

Sebelum proses pengumpulan data dilakukan, observasi pendahuluan juga dilaksanakan, khususnya pada tiga wilayah penelitian, yaitu Kebon Ayu, Labuapi, dan Gelogor. Ini dimaksudkan sebagai informasi awal agar lebih memudahkan proses wawancara terhadap sejumlah informan yang telah ditentukan. Setelah melakukan observasi awal, diperoleh informasi tentang keberadaan migran kembali yang kebetulan sedang cuti menghadapi bulan puasa dan merayakan Idul Fitri dengan keluarganya di kampung halaman. Hal yang sama juga dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang rumah tangga migran, baik yang ditinggal ke Arab Saudi maupun Malaysia.

Dari tiga wilayah penelitian, informan yang berhasil diwawancarai masing-masing adalah sebagai berikut. Untuk lokasi penelitian di Kebon Ayu, ada tiga migran kembali dan dua rumah tangga migran tujuan Malaysia; di lokasi Labuapi, ada satu migran kembali dan empat rumah tangga migran juga tujuan Malaysia; sedangkan empat migran kembali dan empat rumah tangga migran tujuan Arab Saudi untuk daerah Gelogor. Dengan demikian, jumlah keseluruhan informan, baik migran kembali maupun rumah tangga migran adalah sebanyak enam belas. Alasan pengambilan sejumlah informan dari masing-masing wilayah didasarkan pada jumlah migran kembali maupun rumah tangga migran. Desa Kebon Ayu misalnya, merupakan salah satu daerah kantung migran dengan tujuan Malaysia, sedangkan Labuapi merupakan daerah asal migran dengan tujuan yang lebih bervariasi, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Korea. Untuk Desa Gelogor, selain terdapat migran tujuan Malaysia, wilayah ini merupakan kantung migran untuk tujuan negara timur tengah yang salah satunya adalah Arab Saudi. Selanjutnya untuk dapat memberikan makna terhadap hasil-hasil penelitian yang bersifat substantif dipergunakan analisis data deskriptif kualitatif yang dipadukan dengan teknik triangulasi yang meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi (Brannen, 1997; Berg, 1989; dan Triantoro, 1999).

NTB: Kantung Migran Internasional

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang terletak antara 115°46' dan 119°5' Bujur Timur serta 8°10' dan 9°5' Lintang Selatan. Luas wilayah ini sekitar 20.153,15 km² dengan jumlah penduduk pada 2004 sebanyak

4,421 juta jiwa. Dari jumlah tersebut 2,835 juta bertempat tinggal di Pulau Lombok dan 1,586 juta sisanya tinggal di Pulau Sumbawa. Komposisi penggunaan tanah dari luas wilayah NTB adalah sekitar 0,5 juta Ha atau sekitar 27 persen dimanfaatkan untuk sawah, tegalan, ladang, pekarangan, dan tambak. Sementara itu, sisanya sebanyak 1,4 juta Ha atau sekitar 73 persen masih berupa padang rumput, hutan, dan rawa-rawa yang relatif belum diolah secara optimal.

Sebenarnya wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki potensi yang cukup bagus untuk pengembangan beberapa sektor penting, seperti pertanian, peternakan, pertambangan, dan pariwisata. Akan tetapi, beberapa kendala menyebabkan beberapa sektor strategis belum dapat dikembangkan secara maksimal. Sektor utama yang masih mendominasi di wilayah ini adalah pertanian. Akan tetapi, dalam satu dasawarsa terakhir sektor ini mulai ditinggalkan terutama oleh kelompok penduduk usia muda karena alasan pendapatan yang relatif rendah. Selain karena hal tersebut, terbukanya kesempatan untuk bekerja di luar negeri dengan pendapatan yang relatif lebih tinggi menyebabkan kelompok penduduk berusia muda dari Nusa Tenggara Barat lebih memilih meninggalkan daerah asalnya dengan harapan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, menjadi pekerja migran di negara lain telah lama menjadi model strategi untuk menanggapi tekanan ekonomi rumah tangga.

Berdasarkan daerah asal dan negara tujuan, beberapa kantung migran di Nusa Tenggara Barat dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, untuk Pulau Sumbawa adalah di Kabupaten Sumbawa Barat dengan tujuan

Uni Emirat Arab. *Kedua*, untuk Pulau Lombok adalah Kabupaten Lombok Timur yang sebagian migran ke Malaysia, Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat dengan tujuan Malaysia dan Arab Saudi. Keberhasilan migran terdahulu sedikit banyak memengaruhi arah dan tujuan migran berikutnya dalam memilih daerah tujuan.

Secara umum aktivitas migrasi internasional ke luar negeri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perpindahan secara formal/resmi (legal) dan informal/tidak resmi (ilegal). Perpindahan secara resmi adalah yang dikoordinasi oleh BP2TKI, sedangkan perpindahan ilegal adalah menggunakan jasa taikong/sponsor atau calo. Menurut Mantra, dkk. (1999), pekerja migran ilegal ke Malaysia biasanya melewati dua jalur: jalur barat dan jalur timur. Jalur barat yang sering disebut *The Paninsular Malaysian System* memiliki tiga rute hingga bisa memasuki Selat Malaka. *Pertama*, melalui pelabuhan-pelabuhan di Kepulauan Riau, seperti Bengkalis, Dumai, Rupa, dan Bagan Siapiapi, dilanjutkan ke pantai barat Johor dengan berlabuh di Pontianak dan Batu Pahat dengan lama perjalanan hampir semalam. *Kedua*, melalui Tanjung Pinang dan Tanjung Uban di Kepulauan Riau atau Pulau Batam menuju ke timur laut Johor (Pangerang, Guntung, Johor Lama, dan Teluk Langsat) dengan lama perjalanan sekitar tiga jam. *Ketiga*, khusus bagi TKI yang berasal Jawa Timur, mereka menuju Pulau Bawean, setelah sampai di sana mereka dijemput oleh calo/sponsor yang berasal dari Malaysia.

Jalur timur (*The East Malaysian System*) merupakan jalur ilegal yang sangat dikenal oleh TKI yang umumnya berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Flores Timur,

Nusa Tenggara Timur. Rute yang ditempuh adalah dari Ujung Pandang menuju Pare-pare kemudian menuju Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur kemudian menyeberang ke Tawao (Sabah Malaysia Timur) yang memakan waktu sekitar empat hari. Di sisi lain, mereka yang berangkat ke Arab Saudi hampir semuanya adalah migran legal, sedangkan yang ke Malaysia adalah ilegal. Migran ilegal maupun legal dalam hal keberangkatan hampir semuanya menggunakan calo yang lebih dikenal dengan sponsor atau penyanggah dana.

Transfer Devisa Antara Ada dan Tidak Ada

Program Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri (P2TKLN) merupakan salah satu program di bidang perluasan kesempatan kerja dalam rangka pendayagunaan Tenaga Kerja Indonesia dengan memanfaatkan kesempatan kerja ke luar negeri. Selain itu, program yang menjadi prioritas departemen terkait pada saat ini (Depnakertrans) bertujuan memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Para pekerja migran ini juga dapat memberikan kontribusi terutama dalam perolehan devisa bagi negara/daerah asal dalam rangka pembangunan di daerah asal mereka.

Sebuah makalah seminar bertema *Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Penanganan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri* yang disampaikan pada kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI 13 Desember 2005 menyebutkan di NTB, nilai remitan dari pengiriman TKI di luar negeri ke daerah asalnya tercatat kurang lebih Rp2 miliar setiap hari.

Perkiraan ini didasarkan pada jumlah migran yang ada di negara lain yang hampir mencapai 250.000. Jika dikalkulasikan, jumlah uang yang masuk ke NTB dari para pekerja migran di luar negeri melalui kiriman lewat lembaga keuangan resmi dapat mencapai Rp530 miliar setiap tahun. Kedua jumlah tersebut tidak termasuk uang yang dikirim melalui teman atau dibawa sendiri oleh migran pada saat pulang ke kampung.

Hasil penelitian yang dihimpun dari berbagai sumber melaporkan penerimaan remitan dalam satu bulan adalah sekitar Rp32,1 miliar untuk Januari 2003 dan Rp30,2 miliar pada Februari 2003 atau sekitar Rp62,3 dalam dua bulan terakhir. Jumlah tersebut dihimpun oleh BP2TKI dari berbagai lembaga keuangan, seperti Bank BNI, Bank BCA, dan Bank Mandiri. Jika dirata-rata, dalam satu bulan jumlah kiriman yang masuk adalah sekitar Rp1,6 miliar per hari (BP2TKI 2006, hasil perhitungan peneliti). Dalam diskusi tersebut dibahas pula tentang jumlah dana (devisa) yang dihasilkan oleh migran di luar negeri yang dikirim ke Indonesia. Tidak ditemukan jawaban siapa yang paling menikmati devisa tersebut, apakah keluarga migran atau sponsor/penyanggah dana, sebab pemerintah pusat dan daerah tidak mendapatkan apa-apa, selain permasalahan yang ditimbulkan sebagai akibat migrasi.

Walaupun jumlah remitan yang masuk sangat besar untuk setiap harinya, dari serangkaian wawancara yang dilakukan dengan beberapa pihak terkait diketahui tidak sepeser pun remitan tersebut masuk ke pemerintah daerah sebagai pendapatan daerah. Selama ini remitan yang masuk hanya beredar pada kelompok-kelompok tertentu, seperti calo dan penyanggah dana sehingga

jumlah remitan yang masuk tidak seluruhnya dapat dinikmati oleh keluarga migran. Pada tahun awal, transfer dana sebagai pengembalian biaya keberangkatan dan lain-lain dilakukan langsung oleh migran ke rekening bank penyanggah dana/sponsor, sedangkan rumah tangga migran hanya menerima sedikit.

Dari hasil pengamatan lapangan dan wawancara terhadap beberapa informan dari migran kembali, baik dari Malaysia maupun Arab Saudi, diketahui aktivitas migrasi internasional memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga migran. Sebagian besar migran kembali dan rumah tangga migran mengakui adanya lima faktor yang memengaruhi besar kecilnya jumlah remitan yang diperoleh, yaitu status migran, lama bekerja di luar negeri, sumber biaya migrasi, kerajinan, dan kebiasaan hidup. Realita yang dihadapi hampir sebagian migran, terutama yang melalui jalur ilegal, tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Mantra, dkk. (1999) serta Haris dan Andika (2002a). Kedua penelitian tersebut mengatakan aliran remitan yang masuk ke daerah asal sebagian besar hanya beredar pada calo atau taikong. Bedanya adalah saat ini peredaran uang tersebut tidak hanya pada calo dan taikong, tetapi juga pada rentenir.

Dilihat dari jumlah remitan yang masuk ke daerah asal setiap bulan maupun setiap tahunnya yang sangat tinggi sudah selayaknya program penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri secara makro dapat memberikan pengaruh positif terhadap neraca pembayaran negara dari perolehan devisa dan pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Akan tetapi, dari hasil diskusi dengan beberapa

unsur terkait dari Bappeda, Depnakertrans, dan BP2TKI diperoleh informasi bahwa sumbangan dari hasil remitan bagi daerah bersifat tidak langsung, yaitu berupa pajak yang dibayarkan, misalnya pajak pendirian bangunan, pajak kendaraan bermotor, izin usaha, dan pembelian tanah serta transaksi lainnya. Sementara itu, sumbangan langsung yang masuk ke daerah dari jasa pengiriman TKI jumlahnya tidak terlalu banyak. Sebagai ilustrasi, pada 2005 jumlah penerimaan dari jasa pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri melalui jasa perbankan sangat sedikit, hanya sebesar Rp13.300.000,00. Dengan demikian, hanya sekitar Rp1.100.000,00 untuk setiap bulannya yang diperoleh dari jasa bank sebagai jasa pengiriman devisa dari daerah tujuan ke daerah asal.

Pemanfaatan dalam Rumah Tangga

Penelitian Tamtari (1999) maupun Triantoro (1999) tentang migran dari Nusa Tenggara Barat ke Malaysia menyebutkan bahwa penghasilan dan daerah tujuan yang lebih dikenal dengan remitan berpengaruh secara signifikan terhadap keadaan sosial ekonomi rumah tangga yang ditinggalkan. Dalam hal pemanfaatan remitan, rumah tangga migran pada umumnya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya kelangsungan pendidikan anak-anak mereka. Ini adalah suatu hal yang ironis. Di satu sisi mereka memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya pendidikan anak, tetapi di sisi lain cadangan untuk kelangsungan pendidikan sangat terbatas. Ini tampak jelas dari pendidikan anak-anak di daerah ini yang masih relatif rendah. Walaupun tidak semua keluarga migran berpandangan seperti itu, sebagian besar keluarga migran, setelah menyelesaikan utang, akan

memanfaatkan uang kiriman untuk membangun rumah, membeli tanah sawah, ternak, barang-barang elektronik, dan lainnya sebagaimana cuplikan hasil wawancara dengan rumah tangga migran tujuan Malaysia berikut ini.

“... saya menerima kiriman dua kali dalam setahun, kiriman pertama sebanyak 5 juta rupiah setelah hampir delapan bulan suami saya bekerja di Malaysia. Periode berikutnya suami saya mengirim sebanyak Rp3.750.000,00, sementara tidak dipergunakan uang itu saya simpan dulu. Setelah hampir dua tahun saya dapat kiriman lagi sebanyak 7 juta rupiah hingga uang itu mencapai hampir 16 juta rupiah. Dari uang yang ada saya belikan sepetak tanah sawah seluas kira-kira 12 are seharga 15 juta rupiah. Untuk sementara biaya pendidikan anak-anak tidak begitu saya pusingkan karena itu bisa dipikirkan sambil jalan saja” (SNSH 12/11/2005).

Sejalan dengan pendapat tersebut, rumah tangga migran tujuan Arab Saudi juga mengungkapkan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan biaya lainnya sebagaimana terangkum dalam hasil wawancara berikut.

“... saya punya anak tiga orang, dua orang laki-laki semuanya sudah tamat SLTA dan yang satunya masih kelas lima SD. Sewaktu yang dua orang ini masih di SLTA dalam satu bulan saya mengeluarkan untuk BP3-nya mencapai 75 ribu setiap bulannya. Belum lagi untuk biaya transportasi dan uang sakunya minimal 5 ribu setiap harinya. Jadi dalam satu bulan uang untuk dua orang anak ini sekitar Rp315.000,00 belum lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Rasanya cukup berat, tapi karena bapaknya anak-

anak ngirim sekali dalam tiga bulan, semua kebutuhan dapat terpenuhi. Kebetulan juga saya di sini sambilan kerja sebagai rias pengantin yang kadang-kadang hasilnya juga tergantung musim” (Hj. ROS 25/10/2005).

Apa yang diungkapkan rumah tangga migran tujuan Arab Saudi tersebut merupakan sebuah gambaran begitu besarnya perhatian terhadap kelangsungan pendidikan putra-putrinya. Akan tetapi, tidak semua rumah tangga migran merencanakan dengan sungguh-sungguh karena biaya pendidikan dianggap dapat diperoleh “sambil jalan”, dalam arti belum direncanakan secara pasti dan terprogram. Berbeda dengan ungkapan rumah tangga pertama (tujuan Malaysia), rumah tangga migran kedua (tujuan Saudi Arabia) berpandangan lebih luas mengenai kebutuhan biaya pendidikan bagi anggota rumah tangganya. Hal itu didukung oleh suaminya yang sudah hampir dua puluh tahun menjadi pekerja migran di Arab Saudi. Dengan penuh kepastian ia mengatakan:

“semakin lama dan tekun kita bekerja di luar negeri serta dengan perencanaan yang matang dalam mengelola pendapatan insya Allah setelah kita kembali ke tanah air tinggal menikmati hasilnya dan paling tidak hasil yang dapat dilihat adalah pendidikan anak-anak kita terpenuhi” (H. MS 25/11/2005).

Dalam mengalokasikan pendapatan untuk perbaikan kesehatan dan pangan tidak jauh berbeda dengan kebutuhan untuk kelangsungan pendidikan anggota rumah tangga. Hal itu terbukti pada setiap wawancara terhadap migran kembali maupun rumah tangga migran yang tinggal suami/istri. Dari delapan migran kembali dari Arab Saudi

maupun Malaysia sebagian besar mengungkapkan bahwa tujuan mereka bekerja di luar negeri adalah untuk perbaikan ekonomi keluarga. Selanjutnya diajukan lagi pertanyaan yang lebih rinci, terutama yang belum memiliki rumah, ternyata jawaban yang disampaikan pada peneliti adalah setelah mendapatkan uang yang cukup dari hasil kerja di luar negeri, hal pertama yang akan dilakukan adalah membangun rumah, merencanakan membeli sawah, kendaraan bermotor, dan barang elektronik. Bagi yang sudah memiliki rumah, hasil yang diperoleh dipergunakan untuk keperluan usaha produktif tergantung pada keahlian masing-masing. Dari sejumlah wawancara rinci terungkap bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup dan ke mana mereka berobat ketika sakit.

“... dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saya memanfaatkan keuntungan dari hasil jualan yang didapat. Dalam satu hari biasanya dapat keuntungan antara 15 ribu hingga 20 ribu saja. Dari pendapatan sejumlah itu saya pergunakan untuk belanja anak-anak sehari 5.000, arisan 1.000 per hari, bayar cicilan kredit barang 5.000 per hari, dan sisanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari, terutama beras, sedang lauk pauk saya pakai sisa jualan yang tidak habis terjual. Apabila saya atau anak-anak ada yang sakit biasanya saya bawa ke puskesmas saja karena dengan biaya 3.000 kita sudah dapat obat” (SNSH 14/11/2005).

“... setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dengan ketiga anak-anak ini cukup tidak cukup hanya dengan uang 10 ribu saja. Untuk uang saku anak sekolah setiap hari hanya 3.000, apabila ada anak-anak yang sakit biasanya saya bawa ke

puskesmas karena biayanya masih terjangkau. Jika kebetulan uang tidak ada sama sekali dan anak sakit, saya bawa berobat ke dukun dengan membawa beras secukupnya” (FOZH 12/12/2005).

Apabila diperhatikan dua rumah tangga migran tersebut mengungkapkan bagaimana strateginya dalam mengatasi permasalahan, khususnya pemeliharaan kesehatan dan pemenuhan pangan. Dua ungkapan rumah tangga tersebut mencerminkan keadaan rumah tangga migran lainnya di lapangan. Setelah dikaji lebih mendalam, terdapat beberapa faktor yang turut memengaruhi perilaku rumah tangga migran di daerah asal dalam pemeliharaan kesehatan dan pemenuhan pangan keluarga. Faktor-faktor tersebut meliputi latar belakang sosial, seperti pendidikan rumah tangga migran, kemampuan ekonomi rumah tangga, dan budaya dalam masyarakat.

Dalam hal pendidikan, rumah tangga migran yang memiliki latar belakang pendidikan cukup tinggi akan memahami lebih banyak bagaimana pemeliharaan kesehatan dan pemenuhan pangan keluarga. Selain itu, pengalaman selama menjadi pekerja migran di luar negeri tidak dapat diabaikan dalam kaitannya dengan hal tersebut. Selain pendidikan, kematangan ekonomi dan budaya tidak dapat diabaikan, seorang pekerja migran yang sudah berkali-kali ke luar negeri dan berhasil akan memiliki perhatian yang lebih besar, baik terhadap pendidikan, kesehatan maupun pemenuhan pangan.

Penutup

Hasil penelitian menemukan empat hal yang menyebabkan pekerja migran asal Lombok Barat melakukan mobilitas ke luar negeri. Keempat hal tersebut adalah keadaan

ekonomi rumah tangga yang kurang menguntungkan, rendahnya upah di daerah asal, terbatasnya kesempatan bekerja di daerah asal, dan tekanan psikologis. Melakukan migrasi ke luar negeri merupakan salah satu strategi yang dipilih untuk dapat keluar dari berbagai permasalahan di daerah asal.

Migrasi para pekerja ini ke luar negeri menghasilkan devisa yang sangat besar bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat. Menurut laporan resmi dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, nilai remitan yang masuk ke daerah asal dalam satu hari dapat mencapai kurang lebih Rp2 miliar. Dari serangkaian penelitian yang dilakukan diketahui pula jumlah uang yang masuk dalam dua bulan terakhir (Januari-Februari 2003) sekitar Rp60 miliar, atau rata-rata dalam satu hari terdapat uang masuk sekitar Rp1,6 miliar. Akan tetapi, dari sejumlah uang yang masuk tersebut tidak sepeser pun masuk sebagai pendapatan daerah, tetapi diterima oleh pihak-pihak tertentu dan rumah tangga migran. Pemerintah Daerah NTB khususnya tidak mendapatkan apa-apa dari jumlah tersebut. Namun demikian, pemerintah masih dapat meningkatkan pendapatan dan melakukan perluasan kesempatan kerja.

Sebagian besar rumah tangga migran belum ada yang secara khusus mengalokasikan sebagian dari kiriman uang untuk biaya pendidikan dan perbaikan kesehatan. Kebanyakan rumah tangga migran mengutamakan melunasi utang yang dipergunakan untuk biaya bermigrasi, renovasi atau membangun rumah, beli sawah, dan lain-lain. Menurut informasi yang disampaikan migran kembali, rumah tangga migran, perangkat desa, aparat terkait maupun tokoh masyarakat di daerah penelitian diketahui

bahwa selain para calo yang masih dapat berkeliaran, terdapat juga kelompok-kelompok tertentu (rentenir) sebagai jasa pengiriman uang untuk ongkos migrasi. Dalam konteks yang lebih luas terlihat adanya aktivitas migrasi internasional yang seharusnya memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap pendapatan daerah. Akan tetapi, apabila dikaji lebih mendalam remitan dalam jumlah besar yang masuk ke daerah asal belum mampu mendorong peningkatan ekonomi dalam skala besar. Hal ini disebabkan oleh perputaran uang yang masuk didominasi kelompok-kelompok tertentu, seperti calo dan rentenir maupun penyandang dana. Kelompok inilah yang beroperasi secara lugas dan terang-terangan, bahkan berhadapan dengan petugas pemerintah.

Menurut informasi yang disampaikan oleh migran kembali, rumah tangga migran, perangkat desa, aparat terkait maupun tokoh masyarakat di daerah penelitian diketahui pula bahwa selain para calo, terdapat kelompok-kelompok tertentu (rentenir) yang melayani jasa pinjaman uang untuk segala keperluan calon tenaga kerja yang akan ke luar negeri, termasuk biaya hidup rumah tangga yang ditinggalkan. Di satu sisi meminjam uang kepada rentenir merupakan risiko yang cukup berat hingga orang-orang tertentu menyebut pinjaman itu dengan istilah pinjam satu kembali dua atau tiga. Fenomena ini ibarat memakan buah simalakama, jika tidak mau meminjam, tidak bisa menjadi pekerja ke luar negeri dan jika akhirnya terpaksa meminjam beban yang harus dipikul amat berat dalam hal pengembalian.

Sebetulnya pemerintah daerah dapat menjadi penyandang dana yang dibutuhkan

oleh calon pekerja migran ke luar negeri. Jika perlu, meskipun ia mempunyai tanah, sawah, dan lain-lain, ia dapat meminjam kepada pemerintah daerah tanpa agunan. Ataupun kalau harus dengan jaminan, bisa diusahakan dengan bunga yang rendah. Ini penting untuk mengendalikan pertumbuhan calo/rentenir yang sangat tinggi dan memasang bunga pinjaman sangat tinggi pula serta penyitaan harta benda rumah tangga migran. Hal ini banyak terjadi dan menimpa migran yang gagal di luar negeri atau yang hanya mendapatkan sekali kontrak kerja saja.

Sistem pinjaman satu kembali dua atau tiga bagi pekerja migran masih dianggap menguntungkan apabila mereka dapat perpanjangan kontrak kerja lebih dari sekali. Apabila hanya sekali mendapat kontrak kerja, mereka cenderung tidak pulang ke Indonesia dan menjadi migran ilegal. Dalam kondisi untuk menekan jumlah migran ilegal (habis kontrak tidak pulang ke negara asal), maka peran pemerintah daerah menjadi penting. Paling tidak sebagai penyandang dana untuk mendapatkan kesempatan kerja di negara lain yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan rumah tangga migran.

Daftar Pustaka

- Berg, Bruce L. 1989. *Qualitative Research Methods fo the Social Sciences*. Massachusetts: Ally and Bean.
- BPS. 2000. *Keadaan Angkatan Kerja Propinsi Nusa Tenggara Barat*. Mataram.
- . 2000. *Karakteristik Penduduk Kabupaten Lombok Barat*. Mataram.
- Brannen, Julia. 1997. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (alih

- bahasa oleh N.A. Kurde). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Tenaga Kerja Nusa Tenggara Barat. 2004. *Data Ketenagakerjaan 2003-2004*. Mataram.
- Haris, Abdul dan Nyoman Andika. 2002a. *Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional*. Yogyakarta: LESFI.
- . 2000b. *Dinamika Kependudukan dan Pembangunan di Indonesia: Dari Perspektif Makro ke Realitas Mikro*. Yogyakarta: LESFI.
- Hugo, Graeme. 2001. "Effects of international migration on the family in Indonesia", *Asian and Pacific Migration Journal*, 11(1): 13-40.
- Mantra, Ida Bagus, Kasto, dan Yeremias T. Keban. 1999. *Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Suroto, 1993. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Tantiari, Wini. 1999. "Dampak sosial migrasi tenaga kerja ke Malaysia", *Populasi*, 10(2): 30-56.
- Triantoro, Bambang W. 1999. "Migrasi legal dan ilegal ke Malaysia Barat: kasus migrasi internasional di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat", *Populasi*, 10(2): 3-16.